

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BLORA TAHUN 2020

**RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA
TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana kerja (renja) perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada rencana strategis (renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam rangka penyusunan renja perangkat daerah, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Renja perangkat daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan.

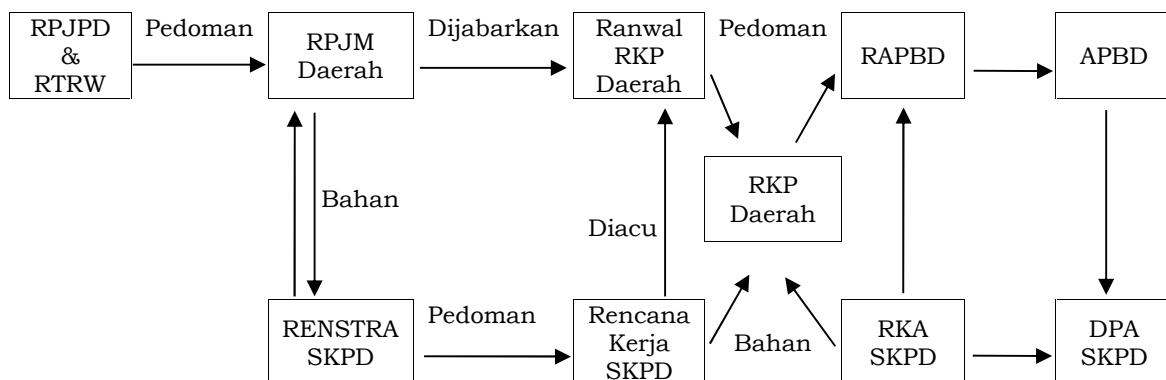
Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kebijakan pemerintah pusat.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen awal perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah dan rancangan awal RKP. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKP, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2020 mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora tahun 2020 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Blora sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2021.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berkewajiban juga menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017-2021.

Secara garis besar urutan tahapan penyusunan Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan review RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan;
2. Melakukan review rancangan awal Perangkat Daerah adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi prioritas program dan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah;
3. Melakukan review dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan mana yang belum optimal dan perlu dilakukan perubahan, dikembangkan atau dihentikan baik di tingkat kebijakan ataupun operasional;
4. Merumuskan tujuan, kebijakan dan sasaran, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2020;
5. Merumuskan prioritas program dan kegiatan;
6. Merumuskan usulan pagu indikatif dan prakiraan maju;
7. Menyusun dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah;
8. Melakukan review hasil Musrenbang;
9. Membahas rancangan Renja Perangkat Daerah dengan Forum Perangkat Daerah;
10. Menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan Musrenbang.

Dengan demikian diharapkan penyusunan Rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 ini dapat menentukan rencana arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2020, dan akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11); dan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2020 adalah sebagai dokumen awal Perencanaan Pembangunan yang dapat memberikan arahan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam Pelayanan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora untuk periode 1 (satu) tahun.

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2020 adalah untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, di dalam Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Dokumen Rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2020 ini disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2019, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Kinerja Output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dan waktu yang ditentukan dalam upaya melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan tersebut.

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dari total belanja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pokok Tahun 2018 sebesar Rp. 9.034.450.000,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.097.300.000,- (termasuk Gaji dan Tunjangan) dengan capaian realisasi anggaran pada akhir tahun 2018 sebesar Rp. 2.077.354.056,- atau 99,05 % dan Belanja Langsung sebesar Rp.6.937.150.000,- dengan capaian realisasi anggaran pada Akhir Tahun 2018 sebesar Rp. 6.711.703.142,- atau 96,8%. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dijabarkan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2018 yang tidak atau belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan :
 - a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan;
Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 28 lembaga , hasil yang dicapai adalah Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan yang diberdayakan dengan anggaran Rp. 275.960.000,- dengan realisasi Rp. 242.345.000,- atau 88%
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa:
 - a. Rintisan Desa Berdikari
Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 5 Desa hasil yang dicapai adalah jumlah desa yang menerima bantuan keuangan rintisan desa berdikari di Kabupaten Blora dengan anggaran Rp. 27.125.000,- dengan realisasi 89% atau Rp. 24.050.000,-
3. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan :
 - a. Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 25 unit belum termasuk PKK, hasil yang dicapai adalah jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih dengan anggaran Rp. 217.000.000,- realisasi 94% atau Rp. 204.350.000,-
 - b. Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengembangan Posyandu
Capaian kinerja kegiatan ini mencapai hasil yang dicapai adalah jumlah posyandu yang terintegrasi dengan anggaran Rp. 234.000.000,- terealisasi 85% atau Rp. 199.882.000,-
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat;
Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 75%, hasil yang dicapai adalah prosentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat dengan anggaran Rp. 4.230.000,- dengan realisasi Rp.3.162.000,-
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

- Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 82%, hasil yang dicapai adalah prosentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran Rp. 120.700.000,- dengan realisasi Rp. 98.705.887,-
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 81% hasil yang dicapai adalah prosentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional dengan anggaran Rp. 9.400.000,- dengan realisasi Rp. 7.630.450,-
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 97% hasil yang dicapai adalah prosentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan dengan anggaran Rp. 105.400.000,- dengan realisasi Rp. 102.174.880,-
 - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 93%, hasil yang dicapai adalah prosentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran Rp. 33.572.000,- dengan realisasi Rp. 31.295.500,-
 - f. Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 98%. hasil yang dicapai adalah prosentase pemenuhan kebutuhan komponen listrik/penerangan bangunan kantor dengan anggaran Rp. 4.700.000,- dengan realisasi Rp. 4.619.000,-
 - g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 80%, hasil yang dicapai adalah prosentase pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan anggaran Rp. 16.450.000,- dengan realisasi Rp. 13.228.720,-
 - h. Penyediaan makanan dan minuman;
Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 97% hasil yang dicapai adalah prosentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat dengan anggaran Rp. 28.200.000,- dengan realisasi Rp. 27.292.000,-
 - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah;
Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 50% hasil yang dicapai adalah prosentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang

- ditindaklanjuti dan disepakati dengan anggaran Rp. 43.600.000,- dengan realisasi Rp. 21.600.000,-
5. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur :
 - a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 89%, hasil yang dicapai adalah jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan dengan anggaran Rp. 259.400.000,- dengan realisasi Rp. 231.058.000,-
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 97% hasil yang dicapai adalah prosentase gedung kantor dalam kondisi baik dengan anggaran Rp. 9.720.000,- dengan realisasi Rp. 9.410.000,-
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 81% hasil yang dicapai adalah prosentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik dengan anggaran Rp. 23.500.000,- dengan realisasi Rp. 18.967.250,-
 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 0% hasil yang dicapai adalah jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal dengan anggaran Rp. 2.394.000,- dengan realisasi Rp. 0,-
 7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 57% hasil yang dicapai adalah jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran Rp. 2.500.000,- dengan realisasi Rp. 1.431.680,-
 - b. Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja SKPD
Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 93% hasil yang dicapai adalah jumlah renstra, renja dan penetapan kinerja SKPD dengan anggaran Rp. 2.820.000,- dengan realisasi Rp. 2.636.000,-

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

- a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
 Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100% hasil yang dicapai adalah Jumlah peserta pelatihan penguatan kelembagaan KPSPAM desa dan jumlah peserta pelatihan MIS bagi desa pamsimas di Kabupaten Blora dengan anggaran Rp. 269.200.000,- dengan realisasi Rp. 268.777.000,-
 - b. Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa;
 Capaian kinerja kegiatan ini baru mencapai 100% hasil yang dicapai adalah Jumlah pameran dan gelar TTG Nasional dan PIN yang diikuti Dinas PMD Kabupaten Blora dengan anggaran Rp. 136.202.000,- dengan realisasi Rp. 136.202.000,-
 - c. Sosialisasi teknologi tepat guna dan Posyantek
 Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100% hasil yang dicapai adalah Jumlah peserta sosialisasi TTG dan Posyantek antar desa di Kabupaten Blora dengan anggaran Rp. 94.237.000,- dengan realisasi Rp. 94.148.000,-
 - b. Penguatan pos pelayanan teknologi
 Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 99% hasil yang dicapai adalah jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi penguatan posyantekdes di Kabupaten Blora dengan anggaran Rp. 82.835.000,- dengan realisasi Rp. 82.333.000,-
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa :
- a. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
 Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100%, hasil yang dicapai adalah jumlah desa yang menerima kegiatan TMMD Kabupaten Blora sebanyak 3 desa dengan anggaran Rp. 835.150.000,- dengan realisasi Rp. 831.653.500,-
 - b. Pemberian stimulan pembangunan desa
 Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100% hasil yang dicapai adalah jumlah desa yang menerima bantuan keuangan ADD, DD, BHPR di Kabupaten Blora sebanyak 271 desa dengan anggaran Rp. 206.565.000,- dengan realisasi Rp. 205.893.450,-
3. Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa :
- a. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan

- Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100% hasil yang dicapai adalah jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan pembekalan aparatur desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan dengan anggaran Rp. 114.900.000,- dengan realisasi Rp. 114.600.000,-
- b. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan pemerintah desa
Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100% hasil yang dicapai adalah jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan pembekalan aparatur desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa dengan anggaran Rp. 209.000.000,- dengan realisasi Rp. 209.000.000,-
 - c. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa
Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100% hasil yang dicapai adalah jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan pembekalan aparatur desa dalam bidang dengan anggaran Rp. 124.280.000,- dengan realisasi Rp. 123.960.000,-
4. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan :
- a. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100% hasil yang dicapai adalah jumlah peningkatan kapasitas PKK dengan anggaran Rp. 750.000.000,- dengan realisasi Rp. 749.133.000,-
5. Program Pemberdayaan Masyarakat, Adat Dan Sosial Budaya :
- a. Pendayagunaan profil desa dan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa
Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 295 Desa/ Kelurahan hasil yang dicapai adalah jumlah desa yang didampingi dengan anggaran Rp. 165.000.000,- dengan realisasi 100% atau Rp. 164.789.000,-
 - b. Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, adat dan sosial budaya
Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 16 desa, hasil yang dicapai adalah jumlah desa yang didampingi dengan anggaran Rp. 134.000.000,- dengan realisasi 99% atau Rp. 132.275.000,-
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan dana pendampingnya
- a. Pengembangan Sistem Informasi Desa
Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 271 Desa, hasil yang dicapai adalah jumlah peserta pelatihan SID di Kabupaten

Blora dengan anggaran Rp. 66.750.000,- dengan realisasi 100% atau Rp. 66.747.500,-

b. TMMD

Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 3 desa, hasil yang dicapai adalah jumlah desa yang mendapatkan bantuan TMMD Provinsi dengan anggaran Rp. 561.600.000,- dengan realisasi 99% atau Rp. 555.391.000,-

7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

a. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100% hasil yang dicapai adalah prosentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantordengan anggaran Rp. 25.000.000,- dengan realisasi Rp. 25.000.000,-

b. Penyediaan alat tulis kantor

Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100% hasil yang dicapai adalah prosentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor dengan anggaran Rp. 53.000.000,- dengan realisasi Rp. 53.000.000,-

c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100%, hasil yang dicapai adalah prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran Rp. 269.700.000,- dengan realisasi Rp. 269.150.100,-

d. Penyediaan peralatan rumah tangga;

Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100% hasil yang dicapai adalah prosentase pemenuhan peralatan rumah tangga dengan anggaran Rp. 47.000.000,- dengan realisasi Rp. 46.888.000,-

e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;

Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100% hasil yang dicapai adalah prosentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati dengan anggaran Rp. 159.620.000,- dengan realisasi Rp. 158.861.025,-

8. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur :

a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 99% hasil yang dicapai adalah jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan dengan anggaran Rp. 200.000.000,- dengan realisasi Rp. 198.575.000,-

b. Pengadaan peralatan gedung kantor

Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 99% hasil yang dicapai adalah jumlah peralatan gedung kantor yang

diadakan dengan anggaran Rp. 200.000.000,- dengan realisasi Rp. 198.575.000,-

- c. Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor

Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 99% hasil yang dicapai adalah jumlah bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor dengan anggaran Rp. 100.000.000,- dengan realisasi Rp.98.600.000,-

- d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 99% hasil yang dicapai adalah prosentase kendaraan dinas/operasional dalam keadaan baik dengan anggaran Rp. 47.600.000,- dengan realisasi Rp. 46.999.620,-

- e. Rehabilitasi sedang/berat bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor

Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100% hasil yang dicapai adalah prosentase bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor dalam keadaan baik dengan anggaran Rp. 200.000.000,- dengan realisasi Rp. 199.225.000,-

9. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :

- a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100% hasil yang dicapai adalah jumlah desa yang didampingi dengan anggaran Rp. 69.860.000,- dengan realisasi Rp. 69.860.000,-

10. Program Peningkatan Kelancaran Pelayanan dan Administrasi Umum

- a. Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir dan tenaga lepas lainnya.

Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100% hasil yang dicapai adalah prosentase honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir dan tenaga lepas lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 139.000.000,- dengan realisasi Rp. 138.446.080,-

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan :

Capaian kinerja program ini mencapai 159 BUMDes, hasil yang dicapai adalah jumlah BUMDes dari target 32 BUMDes. Meski realisasi anggaran tidak terserap 100% yaitu dari anggaran Rp.

253.400.000,- terealisasi Rp. 227.202.500,- tetapi untuk target kinerja sudah melebihi target.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora belum semua memenuhi target kinerja program/kegiatan. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang antara lain :

a. Faktor-faktor penyebab tidak/belum tercapainya target kinerja program/kegiatan karena program/kegiatan tersebut pelaksanaannya belum/tidak sesuai perencanaan yang telah ditentukan. Untuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan berakhirnya periode tahun anggaran 2018 terdapat beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun faktor penghambat pencapaian target adalah sebagai berikut :

- Tahun 2017 adanya pembentukan susunan perangkat daerah yang baru yang mana menjadikan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga terjadi beberapa perubahan susunan bidang dan seksi yang memerlukan penyesuaian SDM terhadap tupoksi yang baru dan wewenang yang lebih luas.
- Tahun 2018 adanya mutasi jabatan di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Blora sehingga terjadi beberapa perubahan surat keputusan yang mempengaruhi keterlambatan penandatanganan dokumen pencairan dan memerlukan penyesuaian SDM terhadap tupoksi yang baru dan wewenang yang lebih luas.
- Perencanaan Kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi).
- Masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pelaksanaan program dan kegiatan.

b. Faktor penyebab terpenuhinya program dan kegiatan yang mencapai target karena program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian besar kegiatan yang mencapai target adalah

kegiatan yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.

- c. Faktor-faktor penyebab program dan kegiatan yang pencapaiannya melebihi target adalah karena adanya tuntutan, kebutuhan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dikarenakan terdapat beberapa program kegiatan yang hingga awal tahun 2019 tidak didukung oleh tersedianya anggaran yang memadai sehingga target capaian kegiatan tidak mencapai 100% dari yang direncanakan sehingga berimplikasi terhadap tidak tercapainya target capaian renstra SKPD 2017-2021 di awal tahun kedua pelaksanaan renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora. Dengan tidak tercapainya target capaian renstra SKPD 2017 - 2021 sesuai yang direncanakan di tahun kedua pelaksanaan mengakibatkan penambahan/perubahan target pada tahun anggaran 2018 dan penyesuaian target capaian pada renstra 2017-2021.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program / kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut:

- Penyesuaian target capaian pada Tahun Anggaran 2019 dan renstra 2017-2021.
- Perubahan parameter penilai prioritas kegiatan.
- Efisiensi alokasi belanja.
- Penambahan pagu anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Akhir Tahun 2018 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Blora dapat kita lihat pada Tabel T-C.29 berikut:

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kabupaten Blora

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11=10/4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN									
01	BIDANG URUSAN									
07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
07	BELANJA LANGSUNG									
07	NON URUSAN									
07	PROGRAM PADA SETIAP SKPD									
07	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									

07	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	70.080.000	4.472.000	4.230.000	3.162.000	75	19.175.000	-	0,00
07	1	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan tambah daya	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	677.700.000	82.568.590	120.700.000	98.705.887	82	186.000.000	-	0,00
07	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	116.900.000	7.156.025	9.400.000	7.630.450	81	11.000.000	-	0,00
07	01	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	575.800.000	103.600.000	105.400.000	102.174.880	97	123.000.000	-	0,00
07	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	252.700.000	24.840.500	25.000.000	25.000.000	100	48.750.000	-	0,00
07	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	357.000.000	48.297.500	53.000.000	53.000.000	100	80.000.000	-	0,00

07	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	162.334.000	23.667.500	33.572.000	31.295.500	93	30.000.000	-	0,00
07	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	116.700.000	4.908.300	4.700.000	4.619.000	98	10.000.000	-	0,00
07	01	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1.188.850.000	321.403.550	269.700.000	269.150.100	100	203.000.000	-	0,00
07	01	01	014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Persentase pemenuhan peralatan rumah tangga	313.930.000	40.764.750	47.000.000	46.888.000	100	25.000.000	-	0,00
07	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	45.840.000	8.768.000	16.450.000	13.228.720	80	7.500.000	-	0,00
07	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	209.975.000	31.531.000	28.200.000	27.292.000	97	50.730.000	-	0,00

07	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	984.620.000	109.806.800	159.620.000	158.861.025	100	130.000.000	-	0,00
07	01	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	554.600.000	63.367.900	43.600.000	21.600.000	50	118.000.000	-	0,00
07	01	01	019	Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran	Prosentase pemenuhan pendukung pelayanan perkantoran	451.000.000	0	0	-	-	24.700.000	-	0,00
07	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
				Pembangunan Gedung kantor		-	-	-	-	-	-	-	0,00
07	01	02	005	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1.515.000.000	-	259.400.000	231.058.000	89	-	-	0,00
07	01	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	850.000.000	-	200.000.000	198.575.000	99	94.500.000	-	0,00

07	01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	500.000.000	-	200.000.000	198.575.000	99	30.000.000	-	0,00
07	01	02	012	Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	350.000.000	-	100.000.000	98.600.000	99	-	-	0,00
07	01	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	401.720.000	64.037.000	9.720.000	9.410.000	97	55.000.000	-	0,00
07	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional dalam keadaan baik	680.600.000	42.895.500	47.600.000	46.999.620	99	125.000.000	-	0,00
07	01	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	133.500.000	14.650.000	23.500.000	18.967.250	81	20.000.000	-	0,00
07	01	02	045	Rehabilitasi sedang/berat bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, gedung kantor (mushola)	Persentase bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor dalam kondisi baik	470.000.000	-	200.000.000	199.225.000	100	50.000.000	-	0,00
07	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR									
07	01	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	305.565.000	37.291.000	69.860.000	69.860.000	100	90.000.000	-	0,00

07	01	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR									
07	01	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	42.394.000	-	2.394.000	-	-	5.000.000	-	0,00
07	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
07	01	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	113.000.000	-	2.500.000	1.431.680	57	23.575.000	-	0,00
07	01	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Jumlah rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	75.820.000	-	2.820.000	2.636.000	93	36.250.000	-	0,00
07	01	09		PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM									
07	01	09	003	Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya	Prosentase honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir dan tenaga lepas lainnya yang dibayarkan	227.300.000	88.800.000	139.000.000	138.446.080	100	-	-	0,00
07	01			URUSAN WAJIB									

07	01			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
07	01	15		PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	Peningkatan Kinerja Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan								
07	01	15	001	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan yang diberdayakan	1.928.400.000	152.415.000	275.960.000	242.345.000	88	123.375.000	-	0,00
07	01	15	002	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat	- Jumlah peserta pelatihan penguatan kelembagaan KPSPAM desa.	1.442.891.000	228.522.464	269.200.000	268.777.000	100	109.000.000	-	0,00
					- Jumlah peserta pelatihan MIS bagi desa pamsimas	218.200.000	-	-	-		-	-	0,00
07	01	15	003	Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa	Jumlah pameran dan gelar TTG Nasional dan PIN yang diikuti	985.702.000	147.537.500	136.202.000	136.202.000	100	81.000.000	-	0,00
07	01	15	005	Sosialisasi teknologi tepat guna dan Posyantek	Jumlah peserta sosialisasi TTG dan Posyantek antar desa	479.537.000	35.200.000	94.237.000	94.148.000	100	13.210.000	-	0,00
07	01	15	006	Penguatan pos pelayanan teknologi	Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi penguatan posyantekdes	784.895.000	2.060.000	82.835.000	82.333.000	99	17.430.000	-	0,00

07	01	15	007	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah desa yang menerima kegiatan TMMD (Kabupaten)	3.654.950.000	-	-	-	-	1.193.975.000		0,00
					Jumlah desa yang menerima kegiatan TMMD (Provinsi)	2.061.600.000	-	-	-	-			0,00
07	01	15	008	Pemberian stimulan pembangunan desa	Jumlah desa yang menerima bantuan keuangan, DD, ADD, BHPR	648.375.000	-	-	-	-	188.095.000		0,00
07	01	15	009	Pendampingan KPMD	Jumlah desa yang didampingi	60.000.000	-	-	-	-	5.760.000		0,00
07	01	15	010	Rintisan Desa Berdikari	Jumlah desa yang menerima bantuan keuangan rintisan desa berdikari	110.000.000	-	-	-	-	10.000.000		0,00
07	01	15	011	Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Desa	Prosentase terpenuhi informasi yang akurat dan mudah di desa	231.000.000	-	-	-	-	-		0,00
07	01	16		PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Jumlah BUMDes								

07	01	16	002	Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Jumlah BUMDes yang mendapatkan pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	2.371.855.000	252.140.250	253.400.000	227.202.500	90	170.000.000	-	0,00
07	01	16	003	Fasilitasi pembentukan BUMDes Bersama	Jumlah BUMDes Bersama yg mengikuti pelatihan	850.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	0,00
07	01	17		PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA									
07	01	17	001	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah desa yang menerima kegiatan TMMD (Kabupaten)	1.112.426.000	248.641.000	835.150.000	831.653.500	100	-	-	0,00
					Jumlah desa yang menerima kegiatan TMMD (Provinsi)	1.123.200.000	-	-	-	-	-	-	0,00
07	01	17	003	Pemberian stimulan pembangunan desa	Jumlah desa yang menerima bantuan keuangan, DD, ADD, BHPR	424.100.000	224.186.500	206.565.000	205.893.450	100	-	-	0,00
07	01	17	006	Pendampingan KPMD	Jumlah desa yang didampingi	138.900.000	54.670.000	2.580.000	2.580.000	100	-	-	0,00

07	01	17	08	Rintisan Desa Berdikari	Jumlah desa yang menerima bantuan keuangan rintisan desa berdikari	80.000.000	19.587.500	27.125.000	24.050.000	89	-	-	0,00
07	01	18		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Prosentase aparatur desa/Kel. telah dilatih manajemen pengelolaan desa/kel.								
07	01	18	001	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan pembekalan aparatur desa dalam bidang pembangunan kawassan pedesaan	1.362.100.000	149.500.000	114.900.000	114.600.000	100	3.000.000	-	0,00
07	01	18	002	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	1.635.000.000	242.160.000	209.000.000	209.000.000	100	210.000.000	-	0,00

07	01	18	003	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	1.333.600.000	149.000.000	124.280.000	123.960.000	100	3.000.000	-	0,00
07	01	19		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN	Prosentase Posyandu aktif								
					Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih								
07	01	19	001	Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih	1.194.025.000	288.030.000	217.000.000	204.350.000	94	113.175.000	-	0,00
07	01	19	002	Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Prosentase PKK (Kab., Kec., Desa) yang mendapatkan pembinaan.	3.797.500.000	497.340.250	750.000.000	749.133.000	100	800.000.000	-	0,00
07	01	19	003	Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengembangan Posyandu	Jumlah Posyandu yang terintegrasi	914.000.000	116.309.000	234.000.000	199.882.000	85	150.000.000	-	0,00

07	01	19	004	Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengembangan Desa	Jumlah peserta seminar peningkatan peran perempuan dipedesaan	66.000.000	65.965.000	-	-	-	-	-	0,00
07	01	20		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, ADAT DAN SOSIAL BUDAYA	Prosentase desa yang memiliki profil desa/kelurahan								
07	01	20	001	Pendayagunaan profil desa dan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah desa yang memiliki profil desa/Kel	1.169.500.000	174.500.000	165.000.000	164.789.000	100	99.000.000	-	0,00
07	01	20	002	Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, adat dan sosial budaya	Jumlah desa adat yang mendapatkan pembinaan	1.307.650.000	81.640.000	134.000.000	132.275.000	99	29.800.000	-	0,00
07	01	20	003	Inventarisasi kekayaan desa	Jumlah updating data inventarisasi kekayaan desa	80.000.000	-	-	-	-	-	-	
07	01	20	004	Pengelolaan kekayaan desa	Prosentase penyelesaian penataan aset dan kekayaan desa dengan baik dan benar	462.000.000	-	-	-	-	-	-	
07	01	21		PROGRAM KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN DESA	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan desa								
07	01	21	001	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan desa	Jumlah rancangan perda yang ditetapkan	775.000.000	-	-	-	-	-	-	-

					Jumlah rancangan perbub yang ditetapkan	-	-	-	-	-	-	-	-
07	01	21	002	Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi dan koordinasi	267.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00
07	01	21	003	Sosialisasi kepada aparatur pemerintah desa dan BPD	Jumlah aparatur desa dan BPD yang mendapatkan sosialisasi	275.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00
07	01	21	004	Fasilitasi dan koordinasi peraturan perundang-undangan desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi dan koordinasi peraturan perundang-undangan desa	331.500.000	-	-	-	-	-	-	0,00
07	01	21	005	Minitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan	92.400.000	-	-	-	-	-	-	0,00
07	01	21	006	Penetapan dan pengesahan batas desa	Jumlah dokumen penetapan dan pengesahan batas desa	231.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00
07	01	21	007	Pembinaan teknis administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan teknis pemerintahan desa	231.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00

07	01	21		PROGRAM BI DANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA.	Jumlah desa yang mendapatkan Bimtek SID								
07	01	21	001	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Jumlah peserta pelatihan SID	-	63.956.000	66.750.000	66.747.500	100	-	-	0,00
07	01	21	002	TMMD	Jumlah desa yang menerima kegiatan TMMD	-	-	561.600.000	555.391.000	99	720.000.000	-	0,00
				Jumlah		45.973.234.000	4.316.186.379	6.937.150.000	6.711.703.142	96,80	5.666.000.000	-	0,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Blora yang berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan melalui Perjanjian Kinerja yang telah dibuat bersama, serta rencana capaian IKK (Indicator Kinerja Kunci) sesuai dengan isian amanat Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Blora.

Berikut Tabel T-C.30 mengenai capaian kinerja dan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora adalah sebagai berikut ;

Tabel T-C-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Jumlah posyantek aktif			1	1	1	1	1	2	6	1	1	
2	Persentase pelaksanaan TMMD, Desa berkembang, ADD, DD, BHPR, dan bantuan keuangan yang terlaksana dengan baik			80	75	80	80	85	100	6	80	80	
3	Persentase desa yang memiliki RPJMDes dan APBDes yang berkualitas baik			60	65	70	75	80	100	100	70	75	
4	Jumlah BUMDes			16	32	40	45	45	70	100	50	60	
5	Persentase aparatur desa/kelurahan yang telah dilatih			100	100	100	100	100	100	100	80	85	
6	Persentase Posyandu Aktif			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih			70	75	80	85	90	8	25	100	100	
8	Persentase desa/kelurahan yang memiliki profil desa/kelurahan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam menentukan pola organisasinya, maka Pemerintah Daerah memerlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas dalam merumuskan, mendesain dan mengimplementasikan visi dan misi pemerintah daerah kedalam pola organisasi pemerintah daerah, dengan organisasi pemerintah kabupaten merupakan wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dan sebagai proses interaksi antara pemerintah institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat sebagai pilar-pilar pembangunan daerah.

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Blora.

Dalam rangka pelayanan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Blora pada Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun Rencana 2020 aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora meliputi:

1. Kepala Dinas 1 orang.
2. Sekretaris Dinas 1 orang.
3. Kasubbag Sekretariat 2 orang.
4. Kepala Bidang Teknis 3 orang.
5. Kepala Seksi Teknis 9 orang.
6. Fungsional Umum 8 orang.

Selain tersebut di atas pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2020 semakin meningkat dengan tersedianya tenaga teknis yang melayani keperluan masyarakat desa dan aparatur Pemerintahan Desa secara riil, baik di lapangan maupun di kantor, dengan ditunjang oleh Tenaga PHTL yang ada di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora adalah sebanyak 13 orang.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Blora. Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi.

1. Kemandirian dan keberdayaan masyarakat belum terwujud secara optimal, hal ini dapat diketahui dari tindak lanjut kegiatan pasca program pemberdayaan masyarakat belum mampu melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan,

2. Belum optimalnya pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat pedesaan, hal ini dapat dilihat jumlah kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif masih
3. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan baik kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa/kelurahan sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun;
4. Belum optimalnya kinerja aparatur dalam menyelenggarakan pelayanan dan pembangunan desa dan belum optimalnya ketersediaan data Profil Desa di Desa/Kelurahan sehingga penyajian data potensi dan tingkat perkembangan desa sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa. Ketersediaan data Profil Desa sangat membantu dalam menentukan rencana intervensi kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota).
5. Belum optimalnya kinerja aparat pemerintah kabupaten terkait Pemberdayaan adat dan sosial budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat masih lemah sehingga dukungan kelembagaan adat dan sosial budaya dalam partisipasi pembangunan perdesaan belum optimal.
6. Masih rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat desa terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan yang terkait. Akibatnya, Undang-Undang tersebut belum bisa dilaksanakan secara optimal.
7. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) aparatur dan rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa. Hal ini mengakibatkan kinerja para aparatur dan kelembagaan tersebut belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan publik yang diharapkan, sehingga berdampak pada belum optimalnya pelayanan/fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat.
8. Belum maksimalnya Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang kreatif, inovatif dan berkualitas. Penyelenggaraan ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan umum dan pelayanan dasar kepada

masyarakat agar terjadi kondisi masyarakat yang aman, nyaman tertib serta adanya kepastian hukum, Strategi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan prima dengan mengedepankan aparatur yang professional, kreatif dan inovatif serta memaksimalkan fungsi sebagai fasilitator dan regulator.

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Dampak yang ditimbulkan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah antara lain:

1. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan,
2. Peningkatan lembaga ekonomi perdesaan,
3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa,
4. Peningkatan peran perempuan dipedesaan,
5. Pemberdayaan masyarakat, adat dan sosial budaya, dan
6. Koordinasi Bidang Pemerintahan Desa.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Secara umum lemahnya partisipasi masyarakat, mudarnya kearifan dan nilai-nilai lokal yang mengakibatkan ketidakberdayaan masyarakat, antarlain disebabkan oleh :

- a. Proses pembentukan kelembagaan di perdesaan memiliki ciri yang sama, yakni dibentuk dari “atas.” Kelembagaan yang dibentuk umumnya lebih berorientasi pada legalitas dan bukan legitimasi yang tidak perlu mempertimbangkan dukungan masyarakat dan pada sisi lain lembaga yang dibentuk biasanya menyertakan pejabat publik sebagai pelindung dan mempunyai hak veto.
- b. Struktur kelembagaan yang dibentuk umumnya berbentuk hirarki, dengan sedikit memberikan ruang untuk berlangsungnya partisipasi masyarakat. Kekuasaan umumnya terpusat pada pemegang jabatan tertinggi yang justru dipihak pelindung yang pada umumnya dipegang oleh pejabat publik.
- c. Aspek formal dan legalitas mengalahkan nilai-nilai kearifan lokal yang selanjutnya mengakibatkan pendekatan dalam penyelesaian masalah-masalah selalu didasarkan kepada aspek legalitas dan

hukum dan bukan berdasarkan hasil pertimbangan musyawarah, nilai, norma ataupun kearifan lokal yang sudah mengakar di masyarakat selama ini.

Dapat disimpulkan bahwa kondisi kelembagaan masyarakat Blora saat ini belum cukup berdaya sebagai wadah yang menyajikan pilihan-pilihan (choices) bagi warganya untuk berbagai aspek kehidupan.

Begitu pula kelembagaan masyarakat belum cukup berdaya dalam memfasilitasi tersuarakannya aspirasi (voices) dalam berbagai aspek kehidupan dari warga masyarakat. Kondisi ini, selain disebabkan oleh proses modernisasi dan praktek pembangunan yang selama ini cenderung mengkondisikan pelemahan daya kemampuan (capability deprivation) atas kelembagaan masyarakat, juga sangat terkait dengan lambatnya proses penguatan wawasan bagi terkuatkannya techno-structure maupun soft-structure masyarakat yang adaptif-kreatif dalam merespon dinamika perubahan. Kondisi ini menuntut agenda pemberdayaan masyarakat yang serius bagi terkuatkannya entitas Blora kedepan.

A. Tantangan

Dalam pengembangan fungsi pelayanannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora diperhadapkan pada berbagai permasalahan yang dapat menjadi tantangan dalam rangka peningkatan kinerja berupa optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi. Tantangan tersebut meliputi :

- a. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa belum sepenuhnya di jalankan sesuai dengan amanah peraturan tersebut.
- b. Pengaruh globalisasi yang mengedepankan sifat rasionalitas, materialistik dan individualistik,
- c. Kuatnya arus kemajuan teknologi komunikasi dan informasi global yang mempengaruhi perilaku dan tatanan kehidupan sosial masyarakat,
- d. Kecenderungan heterogenitas tatanan sosial masyarakat,
- e. Kecenderungan menurunnya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak sistem nilai budaya dalam kehidupan masyarakat lokal,
- f. Tuntutan pelayanan yang lebih transparan, responsif, konsisten dan akuntabel.

- g. Tuntutan ketersediaan Data yang terkait dengan informasi berbagai jenis pelayanan pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat.

B. Peluang

Selain tantangan tersebut di atas, terdapat pula peluang-peluang antara lain:

- a. Pemberlakuan otonomi yang luas memungkinkan Pemerintah Daerah mengembangkan berbagai inovasi dan kreatifitas untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi masyarakat,
- b. Program pemberdayaan masyarakat sudah menjadi salah satu pilar otonomi daerah dan merupakan urusan wajib Kabupaten Blora,
- c. Adanya komitmen pemerintah pusat terhadap program percepatan pembangunan di Indonesia,
- d. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Blora tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Blora 2016-2021.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Ancaman Threats (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- 1) Adanya kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

- 2) Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/pekerjaan;
- 3) Adanya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku;
- 4) Adanya panduan dan sistem mekanisme kerja;
- 5) Tersedianya anggaran.

KELEMAHAN (W):

- 1) Terlalu berorientasi pada anggaran;
- 2) Belum tersedianya sistem informasi data;
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional kerja;

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

- 1) Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;
- 2) Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
- 3) Adanya partisipasi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.
- 4) Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif;
- 5) Adanya program-program bantuan dari propinsi dan pusat;
- 6) Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

ANCAMAN (T):

- 1) Masih rendahnya kualitas Aparatur Desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturanperundang-undangan;
- 2) Rendahnya kualitas SDM di pedesaan;
- 3) Besarnya jumlah keluarga miskin;

- 4) Banyaknya infrastruktur desa yang rusak dan belum memadai;
- 5) Banyaknya sarana dan prasarana kantor desa yang belum memadai.
- 6) Masih ada desa yang berpotensi rendah.

2.3.5. Formulasi Isu-isu penting

Berdasarkan identifikasi permasalahan, dampak terhadap visi-misi Kepala Daerah peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan OPD, maka isu-isu strategis urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Blera sesuai prioritas dapat ditentukan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Desa adalah menjadi isu yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa. Hal ini dikarenakan sebagian besar tingkat pendidikan aparatur Pemerintahan Desa se Kabupaten Blera masih rendah dan kurangnya pemahaman mengenai peraturan – peraturan baru baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Melihat dari kenyataan ini maka Bidang Pemerintahan Desa mengalokasikan anggaran setiap tahunnya untuk memberikan/ melaksanakan pelatihan, sosialisasi, pembinaan dan monitoring bagi aparatur Pemerintahan Desa se Kabupaten Blera
2. Hadirnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ini menjadi tugas penting bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Blera untuk memberikan pemahaman kepada aparatur desa dan masyarakat desa.
3. Adanya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) di setiap desa, dimana tugas pokok dari Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) adalah sebagai pelopor, penggerak, pelaksana teknis, perencanaan partisipatif dan mitra kerja kepala desa, BPD, LPM dan Lembaga Desa lainnya.
4. Masih adanya desa yang belum membentuk BUMDes,
5. Adanya kepala desa yang baru terpilih dan BPD yang baru terbentuk.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Sembilan Agenda Strategis Prioritas dalam pemerintahan lima tahun ke depan disebut dengan NAWACITA sebagai agenda prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguhkebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya “Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-

Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan”, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
3. Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;
4. Meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
5. Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
6. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
8. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA), terdapat delapan Strategi Pembangunan Nasional untuk mewujudkan NAWACITA yaitu:

1. Penguatan tata kelola desa yang baik, melalui:
 - a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Desa;
 - b. Menyusun peraturan pelaksanaan perundangundangan terkait dengan UU Ketransmigrasian, dan PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - c. Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa.

2. Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimum untuk pelayanan dasar diperdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.
3. Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, Dunia Usaha, dan Masyarakat.
4. Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat
5. Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, administrasi kependudukan, pertanahan, akta-akta, dan sebagainya
7. Peningkatan koneksitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi dan perhubungan di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi
8. Peningkatan dan penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan antar daerah.

Strategi Pembangunan Nasional yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal terdapat pada Strategi ke-1, ke-2 dan ke-7 yang kesemuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam kaitan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pemerintah tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga telah mengeluarkan 5 (lima) produk Peraturan Menteri, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Dinas Usaha Milik Desa.
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Berdasarkan RPJM Nasional tercantum tiga agenda Pembangunan Nasional, yaitu agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai; menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya peningkatan kesejahteraan dan menata perekonomian tertuang dalam strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan disertai pemerataan atau *grow with equity*. Strategi ini merupakan pilihan yang paling tepat karena pertumbuhan saja tidak menjamin pemerataan. Pertumbuhan yang dicapai harus memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk menyeimbangkan setiap kebijakan dan langkah antara kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan.

Berdasarkan tiga agenda besar pembangunan nasional, Pemerintah Kabupaten Bloro menjabarkan ke dalam visi misi dan diimplementasikan dalam strategi dan kebijakan sampai dengan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam rencana kerja dan pendanaan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bloro Tahun 2016-2021, visi pembangunan Tahun 2020 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Bloro yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat”.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi Pembangunan Kabupaten Bloro Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintah yang efektif bersih KKN, dan demokratis, melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.
3. Meningkatkan iklim kondusif dan kerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan serta menciptakan lapangan kerja dan pengembangan inventasi.
4. Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik.

6. Mewujudkan dan mendorong tersusunnya kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat miskin (Pro Poor), pro job, pro growth, pro environment dan pro gender.
7. Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Pemerintahan dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang baru, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora secara simultan harus menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2020 yang memuat Program yang menjadi arah bagi implementasi kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam upaya mencapai misinya utamanya yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dan secara substansial merupakan implementasi atas misi No 1, yaitu “Mewujudkan pemerintahan demokratis yang efektif bersih KKN, melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik”, mendukung misi No 4, yaitu “Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal”, dilaksanakan dengan mengimplementasikan program unggulan yaitu percepatan pengentasan kemiskinan melalui bantuan keuangan.

Mengacu pada kebijakan umum pada RPJMD Kabupaten Blora tahun 2016-2021 khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, Program yang tertuang diantaranya :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
4. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adat dan Sosial Budaya.

Disamping ke 5 program di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora juga melaksanakan kegiatan Belanja Tak Langsung berupa belanja bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten Blora dan belanja bantuan keuangan kepada desa se Kabupaten Blora.

Berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 72 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kabupaten Blora, maka mulai tahun 2020 ada penambahan dan perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora. Adapun tambahan program dimaksud adalah :

1. Program koordinasi bidang pemerintahan desa.

Disamping program yang telah disebutkan di atas ada program yang memuat kegiatan-kegiatan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yaitu :

1. Program di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta dana pendampingnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan Tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing Misi.

Disamping Visi yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat”, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mempunyai Visi : “Menjadi lembaga yang mampu secara professional agar terwujud Keterpaduan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menuju Masyarakat yang Mandiri dan Sejahtera”.

Demikian juga dengan misi, disamping misi No 4, yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal”, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora juga mempunyai misi yaitu :

1. Mewujudkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan masyarakat sehingga terlayani secara optimal;

2. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
3. Mewujudkan pemerintahan desa yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan koordinasi bidang pemerintahan desa;
4. Mewujudkan pengembangan desa dan kelembagaan masyarakat, adat dan sosial budaya melalui peningkatan peran perempuan dipedesaan dan pemberdayaan masyarakat, adat dan sosial budaya.

Untuk merealisasikan misi dimaksud, maka perlu merumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis jangka menengah sebagai penunjang misi tersebut. Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora termuat dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam rangka mencapai Visi dan Misi adalah :

Tujuan

Berdasarkan Visi Dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka tujuan yang ingin dicapai adalah: “meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di desa”.

Tabel 3.1
Tujuan dan Indikator Capaian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Tahunn 2020
1	2	4	5	13
1	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di desa	Jumlah desa berdikari	Desa	20
		Persentase swakelola dana desa	%	100
		Cakupan peningkatan ketrampilan kelompok perempuan pedesaan	Kelompok	2
		Jumlah BUMDes yang aktif	Kelompok	45
		Persentase Posyantek yang aktif	%	100

Sasaran

Untuk mencapai tujuan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora ditetapkan empat sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat perdesaan;
2. Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif di Pedesaan;
3. Peningkatan kualitas infrastruktur desa.

Tabel 3.2
Sasaran dan Indikator Capaian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2020
1	3	4	5	13
1	Terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat perdesaan	Jumlah posyantek aktif	Unit	1
		Persentase pelaksanaan TMMD, Desa berkembang, ADD, DD, BHPR, dan bantuan keuangan yang terlaksana dengan baik	%	80
		Persentase penetapan RPJMDes, Musrenbangdes, RKPDes dan APBDes tepat waktu	%	75
2	Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif dipedesaan	Prosentase jumlah BUMDes yang diperdeskan	%	85
		Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih	Kelompok	85
		Prosentase posyandu aktif	%	100
		Prosentase kategori desa	%	100

		Persentase aparatur desa/kelurahan yang telah dilatih	%	100
3	Peningkatan kualitas infrastruktur desa	Persentase penggunaan anggaran desa untuk infrastruktur	%	100
		Jumlah tenaga kerja desa yang terserap	Orang	6.775

Sesuai Dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, maka sasaran tersebut tertuang dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan terdiri dari : 1) penyediaan jasa surat menyurat, 2) penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, 3) penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, 4) penyediaan jasa administrasi keuangan, 5) penyediaan jasa kebersihan kantor, 6) penyediaan alat tulis kantor, 7) penyediaan barang cetakan dan penggandaan, 8) penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, 9) penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, 10) penyediaan peralatan rumah tangga, 11) penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, 12) penyediaan makanan dan minuman, 13) rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, 14) rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, dan 15) penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran.

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Kegiatan terdiri dari : 1) pengadaan kendaraan dinas/operasional, 2) pengadaan perlengkapan gedung kantor, 3) pengadaan peralatan gedung kantor, 4) pengadaan bangunan pendukung rumah dinas rumah jabatan dan gedung kantor, 5) pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, 6) pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional, 7) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan 8) rehabilitasi sedang/berat bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor.

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan terdiri dari : pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan terdiri dari : pendidikan dan pelatihan formal
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah : 1) penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan 2) penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD.
- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
Kegiatan terdiri dari : 1) pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan, 2) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat, 3) penyelenggaraan diseminasi, informasi bagi masyarakat desa, 4) sosialisasi teknologi tepat guna dan posyantek, 5) penguatan pos pelayanan teknologi, 6) pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (Kabupaten dan Provinsi), 7) pemberian stimulan pembangunan desa, 8) pendampingan KPMD, 9) rintisan desa berdikari, dan 1) Pengelolaan jaringan sistem informasi manajemen pemerintah desa.
- Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
Kegiatan terdiri dari : 1) pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa dan 2) fasilitasi pembentukan BUMDes bersama.
- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah : 1) pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan, 2) pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa dan 3) pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa.
- Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.
Kegiatan terdiri dari : 1) pelatihan perempuan dipedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif, 2) pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga 3) peningkatan peran perempuan dalam pengembangan posyandu dan 4) peningkatan peran perempuan dalam pembangunan desa.
- Program Pemberdayaan Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya.
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : 1) pendayagunaan profil desa dan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa, 2) pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, adat dan sosial budaya, 3) inventarisasi kekayaan desa, dan 4) pengelolaan kekayaan desa.

- Program koordinasi bidang pemerintahan desa

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : 1) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan desa, 2) fasilitasi dan koordinasi pemerintahan desa, 3) sosialisasi kepada aparatur pemerintah desa dan BPD, 4) fasilitasi dan koordinasi peraturan perundang-undangan desa, 5) monitoring, evaluasi dan pelaporan, 6) penetapan dan penegasan batas desa, dan 7) Pembinaan teknis administrasi pemerintahan desa.

- Program di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta dana pendampingnya.

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : 1) TMMD (Banprov.)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan OPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrument dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu:

- a) Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- b) Pencapaian SDGs,
- c) Pengentasan kemiskinan,
- d) Pencapaian NSPK dan SPM,
- e) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- f) Pengembangan daerah terisolir,
- g) Dsb

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2020 merencanakan 11 Program dalam 59 kegiatan yang termasuk dalam Belanja Langsung. Program yang dilaksanakan terdiri dari 5 Program yang bersifat rutin dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD dan 6 Program bersifat teknis yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan yaitu:

- a. Penyediaan jasa surat menyurat;
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan;

- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - f. Penyediaan alat tulis kantor;
 - g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - j. Penyediaan peralatan rumah tangga;
 - k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - l. Penyediaan makanan dan minuman;
 - m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah;
 - o. Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan yaitu :
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 - c. Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - d. Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor;
 - e. Pemeliharaan gedung rutin/berkala gedung kantor;
 - f. Pemeliharaan gedung rutin/berkala kendaraan dinas / operasional;
 - g. Pemeliharaan gedung rutin/berkala peralatan gedung kantor; dan
 - h. Rehabilitasi sedang/berat bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan terdiri dari : Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan terdiri dari : Pendidikan dan Pelatihan Formal.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan yaitu :
- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
 - b. Penyusunan rencana Strategis, rencana kinerja, dan Penetapan kinerja SKPD.
6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
- a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat;

- c. Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat desa;
 - d. Sosialisasi teknologi tepat guna dan posyantek;
 - e. Penguatan Pos Pelayanan Teknologi;
 - f. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa;
 - g. Pemberian stimulan pembangunan desa;
 - h. Pendampingan KPMD;
 - i. Rintisan Desa Berdikari; dan
 - j. Pengelolaan jaringan sistem informasi manajemen pemerintah desa.
7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, dengan kegiatan :
- a. pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa; dan
 - b. fasilitasi pembentukan BUMDes bersama.
8. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
- a. pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan;
 - b. pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa; dan
 - c. pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa.
9. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan.
- a. pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif;
 - b. pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - c. peningkatan peran perempuan dalam pengembangan posyandu; dan
 - d. peningkatan peran perempuan dalam pembangunan desa.
10. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa, Adat dan Sosial.
- a. pendayagunaan profil desa dan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. kegiatan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat adat dan sosial budaya;
 - c. Inventarisasi kekayaan desa; dan
 - d. Pengelolaan kekayaan desa.
11. Program Koordinasi Bidang Pemerintahan Desa.
- a. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan desa;
 - b. Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan desa;

- c. Sosialisasi kepada aparaturnya pemerintah desa dan BPD;
- d. Fasilitasi dan koordinasi peraturan perundang-undangan desa;
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. Penetapan dan penegakan batas desa; dan
- g. Pembinaan teknis administrasi pemerintah desa.

12. Program di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta dana pendampingnya.

- a. Pengembangan Sistem Informasi Desa; dan
- b. TMMD

- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dari hasil Forum OPD merencanakan total kebutuhan dana sebesar Rp. 19.409.750.000,- (sembilan belas milyar empat ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. APBD Kabupaten (PAD, DAU, DBH) | Rp. 11.884.750.000,- |
| 2. Bantuan Provinsi : | |
| - Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa (271 desa @ Rp.20.000.000,-) | Rp. 5.420.000.000,- |
| - KPMD (271 desa @ Rp. 5.000.000,-) | Rp. 1.355.000.000,- |
| - TMMD (3 desa) | Rp. 750.000.000,- |

Untuk mengetahui rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2020 dan prakiraan maju tahun 2021 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel T-C.33.

- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 72 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Blora, maka tahun 2020 rumusan program dan kegiatan

tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Karena hal tersebut maka ada penambahan maupun perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora. Adapun Program dan kegiatan dimaksud adalah:

1. Program pemberdayaan masyarakat, adat dan sosial budaya

Pada program ini juga penambahan kegiatan yaitu a) pengelolaan jaringan sistem informasi manajemen pemerintah desa.

2. Program Pemberdayaan masyarakat, adat dan sosial budaya

Pada program ini juga ada penambahan kegiatan yaitu a) Inventarisasi kekayaan desa; dan b) pengelolaan kekayaan desa.

3. Program koordinasi bidang pemerintahan desa

Program ini adalah program baru yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, dimana ada beberapa kegiatan didalamnya yaitu : a) penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan desa; b) fasilitasi dan koordinasi pemerintahan desa; c) sosialisasi kepada aparatur pemerintah desa dan BPD; d) fasilitasi dan koordinasi peraturan perundang-undangan desa; e) monitoring, evaluasi dan pelaporan; f) penetapan dan penegasan batas desa; g) pembinaan teknis administrasi pemerintah desa.

d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33 (Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 Prakiraan maju tahun 2021 Kabupaten Blora), yaitu sebagai berikut:

BAB V

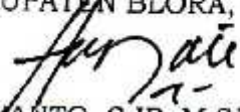
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2020 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2021. RKPD Tahun 2020 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora Tahun 2010-2031, sehingga terdapat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2020 ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta acuan dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sasaran dan target pembangunan yang diamanatkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dalam Renstra serta memperhatikan skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLORA,


HARIYANTO, S.IP. M.Si.

Penata Tingkat I
NIP. 19631017 198603 1 011

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2020 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2021. RKPD Tahun 2020 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora Tahun 2010-2031, sehingga terdapat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2020 ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta acuan dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sasaran dan target pembangunan yang diamanatkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dalam Renstra serta memperhatikan skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

BUPATI BLORA,

DJOKO NUGROHO

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA
TAHUN 2020

Pada hari Rabu tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Aula Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Blora, telah diselenggarakan verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang dihadiri oleh unsur Perangkat Daerah dan Tim Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.

Verifikasi dilaksanakan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2020 telah sesuai dengan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2020
2. Untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Blora Tahun 2020.

Berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan terhadap Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program/Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2020 telah sesuai dengan Program/Kegiatan dalam RKPD Kabupaten Blora Tahun 2020.
2. Indikator kinerja dan target kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2020 telah sesuai dengan indikator kinerja dan target kinerja dalam RKPD Kabupaten Blora Tahun 2020.
3. Sistematisa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020, telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Blora, 24 Juli 2019

Yang menerima hasil verifikasi,
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Blora

Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan
Budaya Bappeda Kabupaten Blora

HARIYANTO, S.IP. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19631017 198603 1 011

MAHBUB DJUNAEDI, S.Pd. M.Si.
Pembina
NIP. 19660311 198603 1 002

Mengetahui,
Kepala Bappeda Kabupaten Blora,

Ir. SAMSUL ARIEF, M.Agr.Bus
Pembina Utama Muda
NIP. 19601025 198903 1 009

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2020 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN BLORA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	indikator kinerja					Pagu Indikatif Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah			Jenis Kegiatan
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
02																			
02	07																		
02	07	15									1.844.444.000			3.393.975.000					
02	07	15	001	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan yang diberdayakan	28 Organisasi	Tenaga pendamping profesional P3MD yang lebih intens dalam tugas pendampingan di desa-desa	28 Organisasi	45.200.000	PAD, DAU, DBH	28 Organisasi	500.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	Lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	
				Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan			Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan yang diberdayakan	28 Organisasi	Tenaga pendamping profesional P3MD yang lebih intens dalam tugas pendampingan di desa-desa	28 Organisasi	45.200.000	PAD, DAU, DBH	28 Organisasi	500.000.000		0	Usulan OPD	
02	07	15	002	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah peserta pelatihan penguatan kelembagaan KPSMAM desa	60 Orang	Terlaksananya manajemen informasi sistem; terlaksananya pemberdayaan masyarakat paska konstruksi; memfasilitasi asosiasi KP-SPAM dan Kader Pemberdayaan Masyarakat	127 Orang	46.700.000	PAD, DAU, DBH	127 Orang	330.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	Desa Pamsimas	

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat			Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Jumlah peserta pelatihan penguatan kelembagaan KPSPAM desa	60 Orang	Terlaksananya managemen informasi sistem; terlaksananya pemberdayaan masyarakat paska konstruksi; memfasilitasi asosiasi KP-SPAM dan Kader Pemberdayaan Masyarakat	60 Orang	46.700.000	PAD, DAU, DBH	127 Orang	330.000.000		0		Usulan OPD
02	07	15	003	Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa			Jumlah pameran dan gelar TTG Nasional dan PIN yang diikuti	4 Kali	Terlaksananya rakor pelaksanaan/ tinjauan gelar TTG,PIN,PPD Nasional dan sosialisasi posyantek	30 Orang	1.450.000	PAD, DAU, DBH	5 Kali	250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	warga masyarakat Kabupaten Blora	
	Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa			kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Jumlah pameran dan gelar TTG Nasional dan PIN yang diikuti	4 Kali	Terlaksananya rakor pelaksanaan/ tinjauan gelar TTG,PIN,PPD Nasional dan sosialisasi posyantek	4 Kali	1.450.000	PAD, DAU, DBH	5 Kali	250.000.000		0		Usulan OPD
02	07	15	005	Sosialisasi Teknologi Tepat Guna dan Posyantek			Jumlah peserta sosialisasi TTG dan Posyantek antar desa	15 Orang	Terlaksananya sosialisasi TTG dan posyantek guna pemberdayaan masyarakat di kab.blora	240 Orang	13.000.000	PAD, DAU, DBH	300 Orang	125.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	Anggota Posyantek	
	Sosialisasi teknologi tepat guna dan posyantek			Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Jumlah peserta sosialisasi TTG dan Posyantek antar desa	15 Orang	Terlaksananya sosialisasi TTG dan posyantek guna pemberdayaan masyarakat di kab.blora	15 Orang	13.000.000	PAD, DAU, DBH	300 Orang	125.000.000		0		Usulan OPD
02	07	15	006	Penguatan Pos Pelayanan Teknologi			Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi penguatan posyantekdes	240 Orang	terlaksananya sosialisasi posyantekdes guna pemberdayaan masyarakat di Kab. Blora	240 Orang	14.350.000	PAD, DAU, DBH	300 Orang	250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	Anggota Posyantekdes	

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	penguatan pos pelayanan teknologi			Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi penguatan posyantekdes	240 Orang	terlaksananya sosialisasi sosialisasi posyantekdes guna pemberdayaan masyarakat di Kab. Blora	240 Orang	14.350.000	PAD, DAU, DBH	300 Orang	250.000.000		0		Usulan OPD
02	07	15	007	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa			Jumlah desa yang menerima kegiatan TMMD (APBD Provinsi)	3 Desa	jumlah desa yang menerima kegiatan TMMD		795.000.000	BANKEU PROV	18 Desa	750.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	desa penerima bantuan TMMD	
							Jumlah desa yang menerima kegiatan TMMD (APBD Kabupaten)	3 Desa	Terlaksananya kegiatan TMMD dan BOP bantuan keuangan kepada desa		782.044.000	PAD, DAU, DBH	3 Desa	793.975.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	desa penerima bantuan TMMD	
	pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa			kabupaten blora Kabupaten Blora			Jumlah desa yang menerima kegiatan TMMD (APBD Provinsi)	3 Desa	jumlah desa yang menerima kegiatan TMMD	3 Desa	795.000.000	BANKEU PROV	18 Desa	750.000.000		0		Usulan OPD
	pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa			Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Jumlah desa yang menerima kegiatan TMMD (APBD Kabupaten)	3 Desa	Terlaksananya kegiatan TMMD dan BOP bantuan keuangan kepada desa	3 Desa	782.044.000	PAD, DAU, DBH	3 Desa	793.975.000		0		Usulan OPD
02	07	15	008	Pemberian stimulan pembangunan desa			Jumlah desa yang menerima bantuan keuangan, DD, ADD, BHPR	271 Desa	Terlaksananya Realisasi Bantuan Keuangan DD, ADD dan BHPR	271 Desa	87.000.000	PAD, DAU, DBH	271 Desa	209.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	desa penerima bantuan keuangan DD, ADD & BHPR	
	pemberian stimulan pembangunan desa			Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Jumlah desa yang menerima bantuan keuangan, DD, ADD, BHPR	271 Desa	Terlaksananya Realisasi Bantuan Keuangan DD, ADD dan BHPR	271 Desa	87.000.000	PAD, DAU, DBH	271 Desa	209.000.000		0		Usulan OPD
02	07	15	009	Pendampingan KPMD			Jumlah desa yang didampingi KPMD	271 Desa	Terlaksananya Pendampingan KPMD didesa pada 271 desa	271 Desa	5.000.000	PAD, DAU, DBH	271 Desa	25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	desa se Kabupaten Blora	
	pendampingan KPMD			Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Jumlah desa yang didampingi KPMD	271 Desa	Terlaksananya Pendampingan KPMD didesa pada 271 desa	271 Desa	5.000.000	PAD, DAU, DBH	271 Desa	25.000.000		0		Usulan OPD

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02 07 15 010	Rintisan desa berdikari			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Jumlah desa yang menerima bantuan keuangan rintisan desa berdikari	5 Desa	terlaksananya bantuan keuangan rintisan desa berdikari	15 Desa	4.700.000	PAD, DAU, DBH	20 Desa	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	desa penerima bantuan keuangan desa berdikari	
	rintisan desa berdikari			Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Jumlah desa yang menerima bantuan keuangan rintisan desa berdikari	5 Desa	terlaksananya bantuan keuangan rintisan desa berdikari	5 Desa	4.700.000	PAD, DAU, DBH	20 Desa	40.000.000		0		Usulan OPD
02 07 15 011	Pengelolaan jaringan sistem informasi manajemen pemerintah desa			Kabupaten Blora			Persentase terpenuhi informasi yang akurat dan mudah di desa	100 %			50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	121.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0		
	pengelola jaringan sistem informasi manajemen pemerintahan desa			kabupaten blora Kabupaten Blora			Persentase terpenuhi informasi yang akurat dan mudah di desa	100 %		100 %	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	121.000.000		0		Usulan OPD
02 07 16	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Percepatan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran desa, dan kualitas pengelolaan Lembaga Ekonomi Pedesaan		Jumlah BUMDes	45 Unit					89.200.000			1.000.000.000				
02 07 16 002	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Jumlah BUMDes yang mendapatkan pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa	190 BUMDes	Terlaksananya pelatihan ketrampilan manajemen BUMDes, pembinaan dan monitoring evaluasi, BUMDes mampu tumbuh dan berkembang sebagai penggerak perekonomian desa	190 BUMDes	72.200.000	PAD, DAU, DBH	235 BUMDes	650.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	BUMDES	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa			Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Jumlah BUMDes yang mendapatkan pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa	190 BUMDes	Terlaksananya pelatihan ketrampilan manajemen BUMDes, pembinaan dan monitoring evaluasi, BUMDes mampu tumbuh dan berkembang sebagai penggerak perekonomian desa	190 BUMDes	72.200.000	PAD, DAU, DBH	235 BUMDes	650.000.000		0		Usulan OPD
02	07	16	008	Fasilitasi pembentukan BUMDes Bersama			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah BUMDes Bersama yang mengikuti pelatihan	15 BUMDes	Terlaksananya fasilitasi dan pendampingan dalam pembentukan BUMDes Bersama, Terbentuknya BUMDes Bersama dalam kawasan perdesaan sebagai wujud antar desa dan/ atau antar BUMDes Mandiri	15 BUMDes	17.000.000	PAD, DAU, DBH	25 BUMDes	350.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	BUMDES bersama
	fasilitas pembentukan BUMDes bersama			Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Jumlah BUMDes Bersama yang mengikuti pelatihan	15 BUMDes	Terlaksananya fasilitasi dan pendampingan dalam pembentukan BUMDes Bersama, Terbentuknya BUMDes Bersama dalam kawasan perdesaan sebagai wujud antar desa dan/ atau antar BUMDes Mandiri	15 BUMDes	17.000.000	PAD, DAU, DBH	25 BUMDes	350.000.000		0		Usulan OPD

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
02	07	18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Percepatan pengantasan kemiskinan	Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran desa, dan kualitas pengelolaan Lembaga Ekonomi Pedesaan						217.360.000			1.909.900.000						
02	07	18	001	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan pembekalan aparatur desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	813 Orang	jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan pembekalan aparatur dea dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan	813 Orang	3.000.000	PAD, DAU, DBH	813 Orang	552.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	Aparatur pemerintah desa, camat, kasi pembangunan	
				pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan			Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan pembekalan aparatur desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	813 Orang	jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan pembekalan aparatur dea dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan	845 Orang	3.000.000	PAD, DAU, DBH	813 Orang	552.500.000		0		Usulan OPD
02	07	18	002	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	271 Orang	jumlah yang mendapatkan pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	271 Orang	210.000.000	PAD, DAU, DBH	271 Orang	612.900.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	Aparatur pemerintah desa, camat, kasi pembangunan	
				pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa			Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	271 Orang	jumlah yang mendapatkan pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	287 Orang	210.000.000	PAD, DAU, DBH	271 Orang	612.900.000		0		Usulan OPD

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02 07 18 003	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	813 Orang	jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan pembekalan aparatur dea dlam bidang manajemen pemerintahan desa	813 Orang	4.360.000	PAD, DAU, DBH	813 Orang	744.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	Aparatur pemerintah desa, camat, kasi pembangunan	
	pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa			Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	813 Orang	jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan pembekalan aparatur dea dlam bidang manajemen pemerintahan desa	558 Orang	4.360.000	PAD, DAU, DBH	813 Orang	744.500.000		0		Usulan OPD
02 07 19	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN	Percepatan pengentasan kemiskinan			Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih	85 Kelompok					1.085.200.000			1.210.000.000				
					Posyandu Aktif	100%												
02 07 19 001	Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih	82 Orang	Meningkatnya SDM dan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru bagi perempuan pedesaan	120 Orang	67.900.000	PAD, DAU, DBH	120 Orang	160.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	6 desa	
	pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif			Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih	82 Orang	Meningkatnya SDM dan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru bagi perempuan pedesaan	82 Orang	67.900.000	PAD, DAU, DBH	120 Orang	160.000.000		0		Usulan OPD
02 07 19 002	Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan	100 %	Prosentase PKK (Kab., Kec., Desa) yang mendapatkan pembinaan	100 %	942.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	850.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	PKK se Kabupaten Blora	

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga			Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan	100 %	Prosentase PKK (Kab., Kec., Desa) yang mendapatkan pembinaan	100 %	942.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	850.000.000		0		Usulan OPD	
02	07	19	003	Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengembangan Posyandu			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Jumlah posyandu yang terintegrasi	320 Posyandu	Terlaksananya Revitalisasi Posyandu, Terlaksananya Pemilihan Pelaksana	354 Orang	75.300.000	PAD, DAU, DBH	6 Posyandu	200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	kader posyandu
	peningkatan peran perempuan dalam pengembangan posyandu			Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Jumlah posyandu yang terintegrasi	320 Posyandu	Terlaksananya Revitalisasi Posyandu, Terlaksananya Pemilihan Pelaksana	320 Posyandu	75.300.000	PAD, DAU, DBH	6 Posyandu	200.000.000		0		Usulan OPD	
02	07	20		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, ADAT DAN SOSIAL BUDAYA	Percepatan pengentasan kemiskinan			Persentase desa/kelurahan memiliki profil desa/kelurahan	100%				99.900.000		894.000.000				
02	07	20	001	Pendayagunaan profil desa dan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Jumlah desa/kelurahan yang memiliki profil desa/kelurahan	295 Desa/Kelurahan	Terlaksananya satgas potensi perkembangan desa/kelurahan	295 Desa/Kelurahan	56.150.000	PAD, DAU, DBH	295 Desa/Kelurahan	240.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	desa/kelurahan se kabupaten blora
	pendayagunaan profil desa dan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa			Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Jumlah desa/kelurahan yang memiliki profil desa/kelurahan	295 Desa/Kelurahan	Terlaksananya potensi perkembangan desa/kelurahan	295 Desa/Kelurahan	56.150.000	PAD, DAU, DBH	295 Desa/Kelurahan	240.000.000		0		Usulan OPD	
02	07	20	002	Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, adat dan sosial budaya			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Jumlah desa adat yang mendapatkan pembinaan	7 Desa	Terbentuknya satgas disetiap kecamatan 1 desa	7 Desa	15.900.000	PAD, DAU, DBH	7 Desa	412.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	desa janjang kec. jiken dan desa sambongrejo kec. sambong
	pendayagunaan profil desa dan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa			Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Jumlah desa adat yang mendapatkan pembinaan	7 Desa	Terbentuknya satgas disetiap kecamatan 1 desa	16 Desa	15.900.000	PAD, DAU, DBH	7 Desa	412.000.000		0		Usulan OPD	
02	07	20	004	Pengelolaan Kekayaan Desa			Kabupaten Blora		Prosentase penyelesaian penataan aset dan kekayaan desa dengan baik dan benar	100 %	penyelesaian penataan aset dan kekayaan desa dengan baik dan benar		27.850.000	PAD, DAU, DBH	100 %	242.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	terwujudnya profil desa/kelurahan

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
	pengelolaan kekayaan desa			kabupaten blora Kabupaten Blora			Prosentase penyelesaian penataan aset dan kekayaan desa dengan baik dan benar	100 %	penyelesaian penataan aset dan kekayaan desa dengan baik dan benar	100 %	27.850.000	PAD, DAU, DBH	100 %	242.000.000		0		Usulan OPD
02 07 21	PROGRAM KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN DESA				Terselenggaranya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	100%					656.750.000			770.400.000				
02 07 21 001	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Desa			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Jumlah rancangan perda yang ditetapkan	6 Dokumen	jumlah rancangan perda dan perbup yang ditetapkan	1 Dokumen	199.400.000	PAD, DAU, DBH	6 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	jumlah rancangan perda yang ditetapkan	
	penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang undangan			kabupaten blora Kabupaten Blora			Jumlah rancangan perda yang ditetapkan	6 Dokumen	jumlah rancangan perda dan perbup yang ditetapkan	3 Dokumen	199.400.000	PAD, DAU, DBH	6 Dokumen	0		0		Usulan OPD
02 07 21 002	Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Desa			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi dan koordinasi	271 Desa	Terlaksananya fasilitasi pemerintahan desa	271 Desa	167.350.000	PAD, DAU, DBH	271 Desa	117.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi dan koordinasi	
	fasilitasi dan koordinasi pemerintahan desa			kabupaten blora Kabupaten Blora			Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi dan koordinasi	271 Desa	Terlaksananya fasilitasi pemerintahan desa	271 Desa	167.350.000	PAD, DAU, DBH	271 Desa	117.000.000		0		Usulan OPD
02 07 21 003	Sosialisasi Kepada Aparatur Pemerintah Desa dan BPD			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Jumlah aparatur desa dan BPD yang mendapatkan sosialisasi	271 Orang	Terselenggaranya sosialisasi bagi aparatur desa dan BPD	271 Desa	75.000.000	PAD, DAU, DBH	271 Desa	181.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	jumlah paratur desa dan BPD yang mendapatkan sosialisasi	
	sosialisasi kepada aparatur pemerintah desa dan BPD			Kabupaten Blora Kabupaten Blora			Jumlah aparatur desa dan BPD yang mendapatkan sosialisasi	271 Orang	Terselenggaranya sosialisasi bagi aparatur desa dan BPD	271 Desa	75.000.000	PAD, DAU, DBH	271 Desa	181.500.000		0		Usulan OPD
02 07 21 004	Fasilitasi dan Koordinasi Peraturan Perundang-undangan Desa			Kabupaten Blora			Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi dan koordinasi	271 Desa			75.000.000	PAD, DAU, DBH	271 Desa	181.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi dan	

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							peraturan perundang-undangan desa										koordinasi peraturan perundang-undangan desa	
	fasilitasi dan koordinasi peraturan perundang-undangan desa			kabupaten blora Kabupaten Blora			Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi dan koordinasi peraturan perundang-undangan desa	271 Desa		271 Desa	75.000.000	PAD, DAU, DBH	271 Desa	181.500.000		0		Usulan OPD
02	07	21	005	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Jumlah desa yang dimonitoring dan dievaluasi	271 Desa			30.000.000	PAD, DAU, DBH	271 Desa	48.400.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan	
	monitoring, evaluasi dan pelaporan			kabupaten blora Kabupaten Blora			Jumlah desa yang dimonitoring dan dievaluasi	271 Desa		271 Desa	30.000.000	PAD, DAU, DBH	271 Desa	48.400.000		0		Usulan OPD
02	07	21	006	Penetapan dan Penegasan Batas Desa			Jumlah dokumen penetapan dan penegasan batas desa	1 Dokumen			85.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	121.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	jumlah dokumen penetapan dan pengesahan batas desa	
	penetapan dan penegasan batas desa			kabupaten blora Kabupaten Blora			Jumlah dokumen penetapan dan penegasan batas desa	1 Dokumen		1 Dokumen	85.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	121.000.000		0		Usulan OPD
02	07	21	007	Pembinaan Teknis Administrasi Pemerintah Desa			Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan teknis pemerintahan desa	271 Desa			25.000.000	PAD, DAU, DBH	271 Desa	121.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	jumlah desa yang mendapatkan pembinaan teknis pemerintahan desa	
	pembinaan teknis administrasi pemerintahan desa			kabupaten blora Kabupaten Blora			Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan teknis pemerintahan desa	271 Desa		271 Desa	25.000.000	PAD, DAU, DBH	271 Desa	121.000.000		0		Usulan OPD
02				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR														

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02 07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
02 07 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan			Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%					1.091.846.000			1.481.500.000				
02 07 01 001	Penyediaan jasa surat menyurat			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	pemenuhan surat menyurat	100 %	4.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	21.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	Dinas PMD Kabupaten Blora	
	penyediaan jasa surat menyurat			Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	pemenuhan surat menyurat	100 %	4.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	21.000.000		0		Usulan OPD
02 07 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	.	100 %	186.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	Dinas PMD Kabupaten Blora	
	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	.	100 %	186.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	150.000.000		0		Usulan OPD
02 07 01 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	.	100 %	11.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	Dinas PMD Kabupaten Blora	
	penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	.	100 %	11.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	40.000.000		0		Usulan OPD
02 07 01 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	.	100 %	124.750.000	PAD, DAU, DBH	100 %	125.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	Dinas PMD Kabupaten Blora	

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	penyediaan jasa administrasi keuangan			kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	.	100 %	124.750.000	PAD, DAU, DBH	100 %	125.000.000		0		Usulan OPD			
02	07	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	.	100 %	12.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	70.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	Dinas PMD Kabupaten Blora	
	penyediaan jasa kebersihan kantor			Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	.	100 %	12.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	70.000.000		0		Usulan OPD			
02	07	01	010	Penyediaan alat tulis kantor			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	.	100 %	78.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	90.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	Dinas PMD Kabupaten Blora	
	penyediaan alat tulis kantor			Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	.	100 %	78.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	90.000.000		0		Usulan OPD			
02	07	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	.	100 %	18.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	35.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	Dinas PMD Kabupaten Blora	
	penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	.	100 %	18.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	35.000.000		0		Usulan OPD			
02	07	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	.	100 %	6.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	35.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	Dinas PMD Kabupaten Blora	
	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	100 %	.	100 %	6.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	35.000.000		0		Usulan OPD			

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usul			
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
02	07	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	.	100 %	80.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	Dinas PMD Kabupaten Blora	
				penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	.	100 %	80.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	200.000.000		0		Usulan OPD
02	07	01	014	Penyediaan peralatan rumah tangga			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	100 %	.	100 %	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	75.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	Dinas PMD Kabupaten Blora	
				penyediaan peralatan rumah tangga			Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	100 %	.	100 %	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	75.000.000		0		Usulan OPD
02	07	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	.	100 %	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	Dinas PMD Kabupaten Blora	
				penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	.	100 %	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	10.000.000		0		Usulan OPD
02	07	01	017	Penyediaan makanan dan minuman			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	.	100 %	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	Dinas PMD Kabupaten Blora	

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	penyediaan makanan dan minuman			Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Persentase kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	50.000.000		0		Usulan OPD
02	07	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	218.406.000	PAD, DAU, DBH	100 %	250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	Dinas PMD Kabupaten Blora	
	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	218.406.000	PAD, DAU, DBH	100 %	250.000.000		0		Usulan OPD
02	07	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	68.250.000	PAD, DAU, DBH	100 %	130.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	Dinas PMD Kabupaten Blora	
	rapat-rapat koordinasi kedalam daerah			Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	presentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi kedalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	68.250.000	PAD, DAU, DBH	100 %	130.000.000		0		Usulan OPD
02	07	01	020	Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran	100 %	220.440.000	PAD, DAU, DBH	100 %	200.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	Dinas PMD Kabupaten Blora	
	penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran			Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat			Persentase pemenuhan dukungan pelayanan	100 %	presentase pemenuhan pendukung pelayanan	100 %	220.440.000	PAD, DAU, DBH	100 %	200.500.000		0		Usulan OPD

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	07	02			Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					173.000.000			330.000.000				
02	07	02	022	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	33.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	Dinas PMD Kabupaten Blora	
				Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	33.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	100.000.000		0		Usulan OPD
02	07	02	024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	persentase kendaraan dinas/operasional dalam keadaan baik	100 %	125.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	Dinas PMD Kabupaten Blora	
				Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	persentase kendaraan dinas/operasional dalam keadaan baik	100 %	125.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	200.000.000		0		Usulan OPD
02	07	02	028	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	15.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	
				Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	15.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	30.000.000		0		Usulan OPD
02	07	03			Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas	100%					80.000.000			75.000.000				
02	07	03	005	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	38 Unit	jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	35 Unit	80.000.000	PAD, DAU, DBH	35 Unit	75.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	Dinas PMD Kabupaten Blora	
				Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	38 Unit	jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	38 Unit	80.000.000	PAD, DAU, DBH	35 Unit	75.000.000		0		Usulan OPD

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	07	05			Peningkatan kapasitas SDM aparatur	100%					5.000.000			15.000.000				
02	07	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal			Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	jumlah PNS mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	5.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Orang	15.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	Dinas PMD Kabupaten Blora	
				pendidikan dan pelatihan formal			Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	jumlah PNS mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	5.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Orang	15.000.000		0		Usulan OPD
02	07	06			Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	100%					4.000.000			62.000.000				
							Nilai Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	B										
02	07	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 Laporan	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 Laporan	2.000.000	PAD, DAU, DBH	7 Laporan	37.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	Dinas PMD Kabupaten Blora	
				penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 Laporan	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 Laporan	2.000.000	PAD, DAU, DBH	7 Laporan	37.000.000		0		Usulan OPD
02	07	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD			Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	3 Dokumen	jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja SKPD	3 Dokumen	2.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Dokumen	25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	Dinas PMD Kabupaten Blora	

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2020		Prakiraan Maju Tahun 2021		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	penyusunan rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja SKPD	3	4	Kabupaten Blora Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	7	8 Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	9 3 Dokumen	10 jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja SKPD	11 3 Dokumen	12 2.000.000	13 PAD, DAU, DBH	14 3 Dokumen	15 25.000.000	16	17 0	18	19 Usulan OPD	
TOTAL											5.346.700.000								11.141.775.000

RENCANA KERJA SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA